

Vol. 13, No. 1
April 2026

p-ISSN: 2407-0556
e-ISSN: 2599-3267

Riwayat Artikel:

Diserahkan:
1 November 2025

Direvisi:
13 Januari 2026

Diterima:
19 Januari 2026

***Magna Latrocinia* di Era Modern:
Sintesis Etika Politik Basilius Agung dan Agustinus
sebagai Fondasi Moral untuk Reformasi Etos
Pejabat Publik di Indonesia**

***Magna Latrocinia in the Modern Era: A Synthesis of
the Political Ethics of Basil the Great and Augustine
as a Moral Foundation for Reforming the Ethos of
Public Officials in Indonesia***

Hendi¹ 
Sugianto^{2*} 

¹ STT Soteria, Indonesia

² STT Reformed Indonesia, Indonesia

Korespondensi

sugianto.halim@reformedindonesia.ac.id

DOI

<https://doi.org/10.33550/sd.v13i1.560>

Halaman

1-17

Abstract

The crisis of public trust in Indonesia, driven by systemic corruption, signifies a fundamental ethical problem among public officials. Contemporary reform approaches (institutional, socio-cultural, and behavioral) tend to be secular-rationalistic and fail to address the teleological question of power's ultimate purpose. To fill this moral-foundational gap, this research turns to Patristic political ethics. Using a qualitative literature study method, this article analyzes the concepts of oikonomia (stewardship) from Basil the Great and iustitia (justice) from Augustine of Hippo. The analysis reveals that Basil's oikonomia redefines public office as stewardship for the poor, while Augustine's iustitia establishes moral justice as the condition for state legitimacy. A synthesis of both yields a theo-ethical framework that reforms the ethos of public officials by reorienting the purpose of office from power to service and motivation from self-love to a love for justice. This study concludes that the Basilian-Augustinian framework offers a virtue-ethics foundation that complements existing reforms, shifting the focus from merely a "clean official" to a "virtuous official" of moral integrity.

Keywords: Public Service Ethics, Augustine, Basil the Great, Iustitia, Oikonomia, Virtue Ethics

Abstrak

Krisis kepercayaan publik yang diakibatkan korupsi sistemik di Indonesia menandakan adanya masalah etis yang fundamental di kalangan pejabat publik. Pendekatan reformasi kontemporer (institusional, sosio-kultural, dan perilaku) cenderung sekuler-rasionalistik dan gagal menjawab pertanyaan teleologis mengenai tujuan hakiki kekuasaan. Untuk mengisi kesenjangan fondasi moral ini, penelitian ini berpaling pada etika politik Patristik. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif, artikel ini menganalisis konsep *oikonomia* (penatalayanan) dari Basilius Agung dan *iustitia* (keadilan) dari Agustinus dari Hippo. Hasil analisis menunjukkan *oikonomia* Basilius mendefinisikan ulang jabatan sebagai penatalayanan bagi kaum miskin, sementara *iustitia* Agustinus menetapkan keadilan moral sebagai syarat legitimasi negara. Sintesis keduanya menghasilkan kerangka teo-etis yang mereformasi etos pejabat publik dengan mereorientasi tujuan jabatan dari kekuasaan menjadi pelayanan dan motivasi dari cinta diri menjadi cinta akan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka Basilian-Agustinian menawarkan fondasi etika kebajikan yang melengkapi pendekatan reformasi yang ada dengan menggeser fokus dari sekadar "pejabat bersih" menuju "pejabat luhur" yang berintegritas moral.

Kata-kata Kunci: Etika Pelayanan Publik, Agustinus dari Hippo, Basilius Agung, *Iustitia*, *Oikonomia*, Etika Kebajikan.

Pendahuluan

Fenomena krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah telah menjadi diskursus sentral dalam studi administrasi publik dan ilmu politik global, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai survei, seperti *Corruption Perceptions Index* yang dirilis secara tahunan, secara konsisten menyoroti sektor publik sebagai arena yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang.¹ Gejala ini melampaui sekadar kerugian finansial negara yang mengikis modal sosial, mendelegitimasi otoritas pemerintah, dan menghambat pencapaian keadilan sosial. Perihal itu adalah korelasi yang telah terbukti secara empiris.² Krisis ini menandakan adanya masalah yang lebih fundamental daripada sekadar kelemahan penegakan hukum, yaitu erosi etos pelayanan (*ethos of service*) di kalangan pejabat publik. Jabatan publik, yang dalam teori demokrasi deliberatif, seharusnya merupakan sebuah amanah (*trusteeship*) untuk mengabdikan kepada kepentingan umum (*bonum commune*). Akan tetapi, jabatan tersebut dalam praktiknya sering kali terdegradasi menjadi alat untuk akumulasi kekuasaan dan kekayaan pribadi atau kelompok.³

Literatur akademis kontemporer telah mengkaji krisis etika ini dari berbagai perspektif. Pertama, pendekatan institusionalis-struktural yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Tradisi ini berargumen bahwa perilaku koruptif adalah produk dari sistem yang lemah, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas. Solusi yang ditawarkan berpusat pada reformasi birokrasi, seperti penyederhanaan prosedur, penguatan lembaga pengawas independen, dan yang paling menonjol dalam dua dekade terakhir, implementasi pemerintahan elektronik (*e-government*). Penggunaan teknologi informasi diyakini dapat memotong jalur birokrasi yang berbelit, mengurangi interaksi tatap muka yang rentan suap, dan meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.⁴ Pendekatan ini sangat berpengaruh dan menjadi tulang punggung banyak program reformasi global. Namun, kritik utamanya adalah ia cenderung bersifat teknokratis dan mengabaikan fakta bahwa teknologi hanyalah alat. Tanpa integritas dari aktor yang menjalankannya, sistem canggih sekalipun dapat dimanipulasi atau bahkan menciptakan bentuk-bentuk korupsi baru yang lebih tersembunyi.

Kedua, pendekatan sosio-kultural memandang korupsi dan krisis etika bukan sebagai anomali, melainkan sebagai produk dari norma sosial dan budaya yang telah mengakar. Dalam konteks banyak negara berkembang, budaya patronase dan klientelisme yang mengutamakan loyalitas personal atau kelompok daripada meritokrasi menciptakan lingkungan yang subur bagi nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.⁵ Pemberian “hadiah” atau “uang terima kasih” yang dianggap wajar dalam

¹ “Corruption Perceptions Index 2023,” Transparency International, 4, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>.

² Bo Rothstein, *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective* (Chicago: University of Chicago Press, 2011), 35.

³ John A. Rohr, *Public Service, Ethics, and Constitutional Practice* (Lawrence: University Press of Kansas, 1998), 55.

⁴ B. Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* (7th Edition) (New York: Routledge, 2018), 189, <https://doi.org/10.4324/9781315813653>.

⁵ Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 112.

interaksi sosial menjadi kabur batasannya dengan penyuaipan ketika masuk ke ranah pelayanan publik. Selain itu, paradigma *New Public Management* (NPM) yang mengadopsi prinsip-prinsip pasar ke dalam sektor publik juga mendapat sorotan. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi, NPM dikritik karena berpotensi menimbulkan konflik peran (*role conflicts*) pada diri pejabat. Etos pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan tergerus oleh tuntutan untuk bertindak layaknya manajer bisnis yang pragmatis.⁶ Pendekatan ini berhasil menyoroti kompleksitas masalah, tetapi terkadang kesulitan menawarkan strategi intervensi yang konkret untuk mengubah budaya yang sudah mapan.

Ketiga, pendekatan psikologi dan perilaku (*behavioral ethics*) mengalihkan fokus dari sistem makro ke mekanisme kognitif individu/pribadi. Pendekatan ini meneliti individu, bahkan yang memiliki niat baik, yang dapat terlibat dalam tindakan tidak etis. Konsep kunci, seperti *ethical fading*, menjelaskan aspek moral dari sebuah keputusan secara tidak sadar dihilangkan dari proses pertimbangan sehingga individu dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri tanpa merasa bersalah.⁷ Faktor-faktor situasional—seperti tekanan dari atasan, konformitas terhadap perilaku kelompok, dan adanya target kinerja yang tidak realistis—juga terbukti dapat mendorong perilaku menyimpang. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam tentang mikro-fondasi dari perilaku koruptif, tetapi sering kali kurang mengeksplorasi sumber-sumber pembentukan karakter moral jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai benteng internal melawan godaan-godaan tersebut.

Dari pemetaan *state of the art* yang lebih dalam ini, sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*) menjadi semakin jelas. Meskipun ketiga pendekatan tersebut memberikan analisis yang kaya dan saling melengkapi, mereka cenderung beroperasi dalam kerangka sekuler-rasionalistik. Mereka menjawab pertanyaan *apa* yang salah dengan sistem (institusionalisme), *bagaimana* budaya membentuk perilaku (socio-kultural), dan *mengapa* individu gagal secara kognitif (psikologi perilaku), tetapi mereka kurang memberikan jawaban atas pertanyaan teleologis: *untuk apa* sesungguhnya kekuasaan itu ada dan *bagaimana* membangun komitmen moral yang berakar kuat pada tujuan yang lebih tinggi dari sekadar kepatuhan pada aturan atau insentif eksternal.

Di sinilah letak kebaruan yang ditawarkan oleh artikel ini. Untuk mengisi kekosongan fondasi moral tersebut, penelitian ini berpaling pada kearifan etika politik dari era Patristik. Periode ini secara intensif menggumuli isu kekuasaan dan keadilan, serta melahirkan pemikir-pemimpin yang sekaligus adalah negarawan. Basilius Agung, misalnya, dalam homilinya *On Social Justice*, secara radikal mendefinisikan ulang kepemilikan dan kekuasaan sebagai sebuah penatalayanan (*oikonomia*) yang harus didedikasikan untuk kaum miskin.⁸ Sementara itu, Agustinus dari Hippo, dalam adikaryanya *De Civitate Dei*, mengajukan pertanyaan fundamental yang relevan hingga

⁶ Jasper van der Meer, Brenda Vermeeren, dan Bram Steijn, "Why do Role Perceptions Matter? A Qualitative Study on Role Conflicts and the Coping Behavior of Dutch Municipal Enforcement Officers," *Urban Affairs Review* 60, no. 2 (2024): 642, <https://doi.org/10.1177/10780874231203892>.

⁷ Ann E. Tenbrunsel dan David M. Messick, "Ethical Fading: The Role of Self-Deception in Unethical Behavior," *Social Justice Research* 17 (2004): 223-36, <https://doi.org/10.1023/B:SORE.0000027411.35832.53>.

⁸ Basil the Great, *On Social Justice: St. Basil the Great*, terj. C. Paul Schroeder (Yonkers: St. Vladimir's Seminary Press, 2017), 54.

hari ini: tanpa keadilan, apalah artinya sebuah negara selain gerombolan perampok besar (*magna latrocinia*)?⁹

Pemilihan kedua figur ini bukan tanpa alasan. Konsep penatalayanan Basilius dan tuntutan keadilan absolut dari Agustinus menawarkan kerangka etis yang melampaui kepatuhan pada aturan (deontologi) atau kalkulasi untung-rugi (utilitarianisme), menuju sebuah etika kebajikan (*virtue ethics*) yang berpusat pada karakter dan tujuan luhur dari jabatan publik. Kebaruan utama penelitian ini adalah mengonstruksikan sebuah kerangka etika pelayanan publik dengan menyintesis konsep *oikonomia* dari Basilius Agung dan *iustitia* dari Agustinus sebagai landasan teo-etis¹⁰ untuk reformasi karakter pejabat publik modern.

Dengan demikian, jembatan konseptual antara problem kontemporer dan solusi patristik ini mengarahkan kita pada tujuan penelitian yang spesifik. Dengan berangkat dari analisis terhadap pemikiran Basilius dan Agustinus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep teologi kerja dan pelayanan publik menurut Basilius Agung; (2) menganalisis konsep keadilan dan legitimasi negara menurut Agustinus; dan (3) merumuskan relevansi dan aplikasi kedua pemikiran tersebut sebagai fondasi etis-teologis untuk memulihkan etos pejabat publik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur mendalam (*in-depth literature review*) untuk menganalisis pemikiran etika politik Basilius Agung dan Agustinus dari Hippo, serta relevansinya bagi krisis etos pejabat publik kontemporer.¹¹ Sumber data primer yang digunakan adalah karya-karya utama kedua Bapa Gereja tersebut, yaitu *On Social Justice* dari Basilius¹² dan *De Civitate Dei* dari Agustinus,¹³ didukung oleh literatur akademis terkini (2015–2025) sebagai data sekunder. Proses analisis data dilakukan melalui sebuah kerangka kerja dua lapis yang terintegrasi, yaitu pendekatan analisis kualitatif dan hermeneutika filosofis. Pendekatan analisis kualitatif berfungsi sebagai kerangka operasional penelitian yang dilakukan melalui tiga tahapan berurutan: (1) deskripsi tekstual untuk mengidentifikasi konsep kunci (*oikonomia* dan *iustitia*); (2) interpretasi konseptual untuk memahami makna teleologisnya dalam konteks patristik; dan (3) sintesis dan kontekstualisasi untuk membangun kerangka teo-etis baru dan merefleksikannya pada problem korupsi di Indonesia.

Hermeneutika filosofis berfungsi sebagai lensa interpretatif yang mendasari setiap tahapan analisis kualitatif. Pendekatan hermeneutika ini berakar pada tradisi Hans-

⁹ Augustine, *The City of God*, terj. Henry Bettenson (London: Penguin Classics, 2003), 4.4. Lihat juga: Myron A. Levine dan Heywood T. Sanders, *Urban Politics: Cities and Suburbs in a Global Age* (11th Edition) (New York: Routledge, 2025), <https://doi.org/10.4324/9781003291183>.

¹⁰ "Teo-etis" adalah istilah hibrida yang menggabungkan teologi (studi tentang Tuhan dan relasi-Nya dengan dunia) dan etika (studi tentang prinsip-prinsip moral). Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada sebuah pendekatan etika yang tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan secara eksplisit pada premis-premis teologis. Artinya, sebuah tindakan dianggap "baik" atau "benar" bukan hanya karena rasional atau bermanfaat, tetapi karena selaras dengan natur dan kehendak Allah sebagaimana dipahami dalam tradisi teologis tertentu.

¹¹ Lihat, misalnya, John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Edition) (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017), 75-78.

¹² Basil the Great, *On Social Justice*.

¹³ Augustine, *The City of God*.

Georg Gadamer dengan fokus pada konsep peleburan cakrawala (*fusion of horizons*).¹⁴ Keunggulan Gadamerian di sini adalah kemampuannya untuk mengatasi jarak waktu dan budaya sehingga memungkinkan teks Patristik "berdialog" secara aktif dengan problem etika publik modern. Dengan demikian, hermeneutika ini memastikan bahwa analisis tidak hanya berhenti pada pemahaman historis, tetapi juga menghasilkan kontribusi yang transformatif dan aplikatif, serta mengintegrasikan pemahaman tekstual yang cermat dengan relevansi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Oikonomia* Basilius Agung: Teologi Kerja sebagai Penatalayanan Publik

Analisis terhadap pemikiran Basilius Agung, khususnya dalam karyanya *On Social Justice* dan homili-homilinya, mengungkapkan sebuah fondasi teologis yang radikal untuk etos pelayanan publik. Konsep sentral yang diusungnya adalah *oikonomia*, yang secara harfiah berarti "pengelolaan rumah tangga.". Namun, oleh Basilius dimaknai secara teologis sebagai sebuah penatalayanan atas segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada manusia.¹⁵ Dalam konteks jabatan dan kekuasaan, pemaknaan ini secara fundamental mengubah persepsi atas kepemilikan dan wewenang. Basilius berargumen bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik absolut atas hartanya; mereka hanyalah administrator sementara. Ia bertanya secara retorik, "Katakan padaku, apa yang sesungguhnya milikmu? Dari mana engkau mengambilnya dan membawanya ke dalam hidupmu?"¹⁶ Bagi seorang pejabat publik, ini berarti ia bukanlah pemilik absolut atas kekuasaan atau sumber daya yang dikelolanya, melainkan seorang *oikonomos* atau penatalayan yang memiliki tanggung jawab moral untuk mendistribusikannya demi kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Ia menegaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan diterima sebagai sebuah penatalayanan dan bukan untuk kenikmatan diri sendiri.¹⁷

Kerangka kerja Basilian ini secara langsung menantang degradasi jabatan publik menjadi alat akumulasi kekayaan pribadi, yakni sebuah fenomena yang disorot dalam pendahuluan sebagai akar krisis kepercayaan. Basilius secara tajam mengutuk penimbunan sumber daya. Dalam homilinya yang terkenal Kepada Orang Kaya (*In Divites*), ia menyatakan bahwa menahan kekayaan yang seharusnya didistribusikan adalah sebuah bentuk perampokan: "Roti yang engkau simpan adalah milik si lapar; jubah yang engkau kunci di lemarmu adalah milik si telanjang; sepatu yang membusuk di rumahmu adalah milik mereka yang tak beralas kaki; perak yang engkau kubur adalah

¹⁴ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (2nd Revised Edition), terj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall (London: Continuum, 1989), 302-307.

¹⁵ Basil the Great, *On Social Justice*, 54.

¹⁶ Basil the Great, 39. Ini adalah parafrase dari pertanyaan retorik yang ia ajukan dalam homili *I Will Tear Down My Barns*.

¹⁷ Andrew Louth, *Selected Essays Volume I: Studies in Patristics*, peny. Lewis Ayres dan John Behr (Oxford: Oxford University Press, 2023), <https://www.scribd.com/document/664435893/Andrew-Louth-Selected-Essays-Volume-I-Studies-in-Patristics-ed-Lewis-Ayres-John-Behr>.

milik si miskin.”¹⁸ Pernyataan ini secara radikal mendefinisikan ulang korupsi, bukan hanya sebagai tindakan aktif mengambil yang bukan haknya, tetapi juga sebagai tindakan pasif menahan apa yang menjadi hak orang lain. Jika dalam praktik koruptif modern seorang pejabat bertanya, “Apa yang bisa saya peroleh dari jabatan ini?” maka etika Basilian membalik pertanyaan tersebut menjadi, “Siapa yang dirugikan oleh kelalaian saya dalam menggunakan wewenang ini?”

Pemikiran ini melampaui sekadar kepatuhan prosedural yang menjadi fokus pendekatan institusionalis-struktural dalam reformasi birokrasi. Basilius tidak hanya berbicara tentang sistem yang transparan, tetapi tentang transformasi hati dan niat (*intentio*) dari sang pejabat. Dalam karyanya *The Long Rules*, ia menekankan bahwa cinta kepada Tuhan dan sesama adalah dasar dari semua perintah yang menuntut lebih dari sekadar ketaatan eksternal.¹⁹ Ini menyorot langsung pada akar psikologis dari perilaku koruptif, seperti yang dijelaskan oleh konsep *ethical fading*, yang menghilangkan aspek moral dari sebuah keputusan. Etika *oikonomia* Basilius mencegah “pemudaran etis” ini dengan menjadikan pertimbangan moral, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, sebagai inti dari setiap keputusan administratif. Teologi kerja yang ia tawarkan berfungsi sebagai benteng internal yang kokoh, sebuah “motivasi suci” yang mendorong individu untuk bertindak benar bahkan tanpa pengawasan eksternal.

Lebih jauh, konsep *oikonomia* ini menawarkan koreksi kritis terhadap paradigma *New Public Management* (NPM) yang berisiko mengikis etos pelayanan. Sementara NPM mendorong pejabat untuk bertindak seperti manajer bisnis yang pragmatis, etika penatalayanan Basilius menekankan bahwa tujuan akhir dari “efisiensi” dalam pelayanan publik bukanlah keuntungan, melainkan perwujudan keadilan dan belas kasih. Relevansinya dengan administrasi publik modern sangat tajam. Studi kontemporer menunjukkan bahwa komitmen afektif pegawai pemerintah meningkat secara signifikan ketika mereka merasakan adanya autentikasi dalam tanggung jawab sosial organisasi mereka, sebuah perasaan “senang berbuat baik.”²⁰ Etika *oikonomia* Basilius menyediakan kerangka kerja autentik tersebut, dengan mendefinisikan “perbuatan baik” bukan sebagai program tanggung jawab sosial (CSR) tambahan, melainkan sebagai fungsi inti dari jabatan itu sendiri.

Secara praktis, Basilius sendiri mencontohkan prinsip ini dengan mendirikan Basiliad, sebuah kompleks amal masif yang disebut sebagai “kota baru” yang menyediakan rumah sakit, dapur umum, dan tempat penampungan. Tindakan ini adalah manifestasi konkret dari teologinya: kekuasaan dan kekayaan harus diubah menjadi pelayanan nyata. Ini adalah bentuk inovasi sosial pada masanya yang beresonansi dengan seruan modern untuk berinovasi di sektor publik, bukan hanya

¹⁸ Basil the Great, *Exegetic Homilies*, terj. Sister Agnes Clare Way (Washington: The Catholic University of America Press, 1963), <https://www.scribd.com/document/553602675/Saint-Basil-Exegetic-Homilies-St-Basil-Sister-Agnes-Clare-Way>. Kutipan ini berasal dari Homili In Divites (Kepada Orang Kaya).

¹⁹ Basil the Great, *Ascetical Works*, terj. Sister M. Monica Wagner (Washington: The Catholic University of America Press, 1999), 233.

²⁰ Kenn Meyfroodt, Sebastian Desmidt, dan Saskia Crucke, “Feeling Good About Doing Good: How the Perceived Authenticity of Organizational Social Responsibility Impacts Affective Organizational Commitment of Local Government Employees,” *Public Performance & Management Review* 48, no. 4 (2025): 880–907, <https://doi.org/10.1080/15309576.2025.2491420>.

dalam teknologi, tetapi juga dalam model pelayanan.²¹ Bahkan, proyek ini dapat dilihat sebagai bentuk awal dari kemitraan publik-umum (*public-common partnership*) yang kini menjadi diskursus dalam tata kelola kota modern yang mengelola sumber daya (dalam hal ini milik gereja dan donatur) untuk kepentingan publik yang paling rentan.²²

Tindakan Basilius juga mencerminkan sebuah kebijakan investasi yang bertujuan “memperbaiki kota yang rusak” (*fixing broken cities*), bukan dengan infrastruktur fisik semata, tetapi dengan membangun infrastruktur sosial yang berpusat pada manusia.²³ Dalam *Ascetical Works*, Basilius menguraikan pentingnya keteraturan dan tujuan dalam komunitas yang menekankan kontribusi setiap anggota pada kebaikan bersama.²⁴ Visi ini kontras dengan pendekatan teknokratis murni yang sering kali gagal karena mengabaikan dimensi manusia. Kegagalan dalam kebijakan, seperti yang dicatat oleh Trein dan Vagionaki, sering kali menjadi prasyarat untuk inovasi.²⁵ Basiliad dapat dilihat sebagai inovasi radikal yang lahir dari kegagalan sistem sosial-ekonomi yang ada untuk merawat warganya yang paling miskin.

Konsep *oikonomia* Basilius juga memberikan landasan teologis untuk menolak budaya patronase dan klientelisme yang disorot dalam Pendahuluan. Dalam sistem Basilian, loyalitas utama seorang pejabat bukanlah kepada patron atau kelompoknya, melainkan kepada Tuhan sebagai Pemilik utama dan kepada seluruh komunitas sebagai penerima manfaat. Dalam *The Morals*, Basilius menggarisbawahi bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hal itu adalah sebuah prinsip yang meruntuhkan dasar dari nepotisme dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.²⁶ Dengan demikian, *oikonomia* menuntut sebuah meritokrasi yang didasarkan pada kebajikan dan pelayanan, bukan pada koneksi personal.

Pemikiran Basilius ini juga beresonansi dengan diskusi kontemporer tentang politik perkotaan dan tata kelola partisipatif.²⁷ Etos penatalayanan menuntut agar pejabat publik tidak hanya bertindak untuk rakyat, tetapi juga bersama rakyat. Pendirian Basiliad bukanlah proyek elitis dari atas ke bawah, melainkan respons langsung terhadap kebutuhan nyata yang diamati di tengah komunitas. Hal ini sejalan dengan argumen modern yang menekankan pentingnya tata kelola partisipatif di tingkat lokal untuk mengatasi dilema institusional antara demokrasi perwakilan dan efektivitas kebijakan.²⁸ Dengan menempatkan kaum miskin dan terpinggirkan sebagai prioritas utama, etika

²¹ Philipp Trein dan Thenia Vagionaki, “Why policy failure is a prerequisite for innovation in the public sector,” *Policy & Politics* 52, no. 4 (2024): 586–605, <https://doi.org/10.1332/03055736Y2023D000000012>.

²² Iolanda Bianchi, “The democratising capacity of new municipalism: beyond direct democracy in public-common partnerships,” *Policy & Politics* 53, no. 2 (2025): 403–22, <https://doi.org/10.1332/03055736Y2024D000000033>.

²³ John Kromer, *Fixing Broken Cities: New Investment Policies for a Changed World* (2nd Edition) (New York: Routledge, 2023), <https://doi.org/10.4324/9781003355854>.

²⁴ Basil the Great, *Ascetical Works*, 217–218.

²⁵ Trein dan Vagionaki, “Why policy failure is a prerequisite for innovation,” 587.

²⁶ Basil the Great, *Ascetical Works*, 71–110. Bagian ini merujuk pada *The Morals* (Moralia).

²⁷ Lihat misalnya, Annika Marlen Hinze dan Dennis R. Judd, *City Politics: Cities and Suburbs in 21st Century America* (11th Edition) (London: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003175315>.

²⁸ Nils Hertting dan Clarissa Kugelberg (peny.), *Local Participatory Governance and Representative Democracy: Institutional Dilemmas in European Cities* (1st Edition) (New York: Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315471174>.

Basilian secara inheren mendorong model pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif yang tidak hanya mengukur legitimasi kebijakan dari keluaran (*output*), tetapi juga dari prosesnya yang melibatkan mereka yang paling terdampak.

Lebih lanjut, teologi kerja Basilian ini dapat dilihat sebagai anteseden spiritual dari konsep “inovasi kebijakan” modern. Ketika Basilius menciptakan Basiliad, ia tidak hanya melakukan amal, tetapi juga melakukan intervensi sistemik terhadap masalah kemiskinan dan kesehatan publik di kotanya. Ini adalah sebuah “inovasi” yang lahir dari krisis, sebuah tema yang juga dianalisis dalam studi administrasi publik modern. Krisis sering kali menjadi pendorong utama reformasi birokrasi.²⁹ Para sarjana seperti Heinelt, Egner, dan Hlepas mencatat bahwa kondisi untuk pengembangan inovasi di tingkat lokal sangat bergantung pada kapasitas aktor untuk membingkai ulang masalah dan memobilisasi sumber daya dengan cara baru.³⁰ Basilius melakukan persis hal ini: ia membingkai ulang kekayaan sebagai sumber daya komunal dan memobilisasinya untuk menciptakan solusi institusional yang belum pernah ada sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa inovasi sejati berakar pada visi moral yang kuat.

Visi *oikonomia* Basilius juga menawarkan perspektif kritis terhadap strategi pembangunan regional modern. Dalam konteks global yang baru, kebijakan regional sering kali berfokus pada “spesialisasi cerdas” (*smart specialisation*) dan penciptaan ruang pengetahuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.³¹ Meskipun penting, pendekatan ini berisiko mengabaikan dimensi keadilan sosial jika tidak diimbangi dengan komitmen etis. Pemikiran Basilius mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pengembangan regional bukanlah sekadar pertumbuhan PDB, melainkan kesejahteraan holistik seluruh warganya, terutama yang paling rentan. Konsep penatalayanan mendorong para perencana dan pejabat publik untuk bertanya: “Apakah inovasi dan spesialisasi ini benar-benar melayani seluruh komunitas atau hanya menguntungkan segelintir elite teknologi dan bisnis?”³² Dengan demikian, etika Basilian dapat menjadi kompas moral untuk menjembatani visi teknokratis dengan realitas kebutuhan sosial di lapangan.

Pada tingkat yang lebih dalam, konsep penatalayanan Basilian secara implisit mengandung sebuah teologi tentang “misteri” (*mystagogy*) dalam pelayanan publik. Pelayanan bukan sekadar tindakan administratif, tetapi sebuah partisipasi dalam karya ilahi yang lebih besar. Dalam tradisi Timur, *mystagogy* adalah proses membimbing seseorang ke dalam misteri iman yang lebih dalam.³³ Saat diterapkan pada pelayanan publik, seorang pejabat yang mengadopsi etos *oikonomia* tidak hanya melihat tumpukan dokumen atau prosedur birokrasi, tetapi melihat “wajah Kristus” dalam diri warga yang ia layani, khususnya yang miskin dan menderita. Perspektif sakramental ini mengubah

²⁹ Hans Pitlik, “Reforming the Public Administration: The Role of Crisis and the Power of Bureaucracy Reforming the Public Administration,” *Academia*, https://www.academia.edu/79357261/Reforming_the_Public_Administration_The_Role_of_Crisis_and_the_Power_of_Bureaucracy_Reforming_the_Public_Administration_The_Role_of_Crisis_and_the_Power_of_Bureaucracy_Reforming_the_Public_Administration_the_role_of_crisis_and_the_power_of_bureaucracy.

³⁰ Hubert Heinelt, Björn Egner, dan Nikolaos-Komninos Hlepas (peny.), *The Politics of Local Innovation: Conditions for the Development of Innovations* (1st Edition) (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003084006>.

³¹ Basil the Great, *Ascetical Works*, 218.

³² Basil the Great, *On Social Justice*, 58.

³³ Basil the Great, *Ascetical Works*, 110.

pekerjaan yang mungkin terasa duniawi dan melelahkan menjadi sebuah panggilan suci. Hal ini memberikan makna dan tujuan yang mendalam yang tidak dapat diberikan oleh insentif finansial atau ancaman hukuman. Selain itu, perspektif ini menjadi sumber kekuatan moral untuk menolak godaan korupsi.

Konsep *Iustitia* Agustinus: Keadilan sebagai Prasyarat Legitimasi Negara

Jika Basilius membangun etos pelaksanaan kekuasaan, Agustinus dari Hippo (354-430 M) memberikan kriteria legitimasi kekuasaan itu sendiri melalui konsep keadilan (*iustitia*). Dalam magnum opusnya, *De Civitate Dei* (Kota Allah), ia mengajukan pertanyaan retorik yang radikal: “*Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?*”, “Tanpa keadilan, apakah artinya sebuah negara selain gerombolan perampok besar?”³⁴ Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan postulat teoretis yang menetapkan keadilan sebagai syarat *sine qua non* eksistensi negara. Tanpa keadilan, entitas politik yang memegang kekuasaan tidak layak disebut negara (*res publica*), melainkan hanya sekelompok penjahat dalam skala besar.

Agustinus mengilustrasikan argumennya dengan anekdot terkenal tentang seorang perompak yang ditangkap oleh Aleksander Agung. Ketika Aleksander bertanya apa yang ada dalam pikirannya sehingga ia berani mengganggu lautan, perompak itu menjawab, “Hal yang sama dengan yang ada dalam pikiranmu ketika engkau mengganggu seluruh dunia! Tetapi karena aku melakukannya dengan sebuah kapal kecil, aku disebut perompak; sedangkan engkau, yang melakukannya dengan armada besar, disebut kaisar”.³⁵ Agustinus menyimpulkan bahwa jawaban itu “elegan dan benar”. Melalui analogi ini, ia meruntuhkan pretensi kekuasaan yang hanya didasarkan pada kekuatan. Legitimasi tidak datang dari kemampuan menaklukkan, tetapi dari keadilan yang menjiwai tindakan. Seorang pejabat publik modern yang menyalahgunakan wewenang, betapapun kecilnya, pada dasarnya melakukan tindakan yang sama dengan seorang perampok; perbedaannya hanya pada skala dan legitimasi palsu yang disandangnya.

Bagi Agustinus, keadilan sejati (*vera iustitia*) tidak dapat ditemukan secara sempurna di “Kota Duniawi” (*Civitas Terrena*), tatanan politik yang diwarnai oleh cinta diri (*amor sui*). Keadilan sejati hanya ada di “Kota Allah” (*Civitas Dei*), komunitas spiritual yang didasarkan pada cinta kepada Tuhan (*amor Dei*).³⁶ Namun, negara duniawi tetap diperlukan untuk memelihara perdamaian sementara (*pax terrena*). Legitimasinya bergantung pada sejauh mana ia mendekati keadilan sejati, yang didefinisikan sebagai “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya” (*suum cuique tribuere*). Hak pertama dan utama, bagi Agustinus, adalah memberikan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Ia berargumen, “Bagaimana mungkin ada keadilan dalam diri manusia yang merampas manusia dari Tuhan yang benar dan menyerahkannya kepada setan-setan yang najis?”.³⁷ Keadilan vertikal (kepada Tuhan) adalah prasyarat bagi keadilan horizontal (antarmanusia).

³⁴ Augustine, *The City of God*, 4.4.

³⁵ Augustine, 4.4.

³⁶ Augustine, 14.28.

³⁷ Augustine, *The City of God*, 19.24.

Implikasi dari pemikiran ini terhadap etos pejabat publik sangat mendalam. Pertama, ia menempatkan standar moral absolut bagi kekuasaan. Legitimasi pejabat tidak diukur dari hukum positif, tetapi dari komitmennya pada keadilan. Ketika seorang pejabat mengorupsi, ia mengubah esensi negaranya menjadi gerombolan perampok. Bagi Agustinus, korupsi berakar pada kerakusan (*avaritia*) dan nafsu berkuasa (*libido dominandi*), manifestasi dari *amor sui* dan musuh utama keadilan.³⁸ Kedua, ia mendefinisikan ulang *res publica* (urusan publik). Mengikuti Cicero, ia memahami *res publica* sebagai komunitas yang dipersatukan oleh kesepakatan hukum dan kepentingan bersama. Namun, Agustinus menambahkan syarat krusial: persatuan itu harus didasarkan pada cinta akan keadilan. Tanpa itu, tidak ada *res publica*.³⁹ Pejabat korup, dengan demikian, tidak hanya mencuri aset, tetapi menghancurkan ikatan sosial yang membentuk negara, serta menciptakan konflik dalam tata kelola dan perencanaan yang seharusnya harmonis.⁴⁰

Pemikiran Agustinus juga memberikan fondasi bagi supremasi hukum yang bermoral. Hukum negara (*lex temporalis*) harus selaras dengan hukum abadi (*lex aeterna*). Dalam *De Libero Arbitrio* (Tentang Kehendak Bebas), Agustinus menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali.⁴¹ Ini memberikan pejabat publik standar etis yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan buta pada peraturan atau atasan yang sering menjadi sebuah faktor pembenaran dalam perilaku tidak etis. Loyalitas tertinggi seorang pejabat terletak pada keadilan itu sendiri.

Lebih jauh, Agustinus membedakan antara “menggunakan” (*uti*) dan “menikmati” (*frui*). Hal-hal duniawi, termasuk jabatan, harus *digunakan* untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Masalah muncul ketika manusia *menikmati* apa yang seharusnya hanya *digunakan*. Seorang pejabat yang *menikmati* jabatannya, yakni dengan menjadikannya sumber kepuasan dan keuntungan pribadi, telah memutarbalikkan tatanan moral.⁴² Jabatan publik adalah sarana (*uti*) untuk melayani, bukan tujuan akhir untuk dinikmati (*frui*). Konsep ini secara langsung menantang paradigma pragmatis NPM yang berisiko mendorong pejabat fokus pada hasil yang dapat *dinikmati* (seperti bonus) tanpa mempertimbangkan tujuan moral yang lebih besar.

Konsep perdamaian (*pax*) juga sentral, yang didefinisikan sebagai “ketenangan dalam keteraturan” (*tranquillitas ordinis*). Keteraturan (*ordo*) adalah penataan hal-hal yang setara dan tidak setara, yang masing-masing memberikan tempatnya yang semestinya.⁴³ Korupsi dan ketidakadilan secara inheren mengacaukan tatanan ini. Ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenang, ia menciptakan kekacauan dengan menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan publik. Dengan demikian, korupsi bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga sebuah serangan terhadap perdamaian itu sendiri. Politik perkotaan di era global, seperti yang dianalisis oleh para sarjana modern, sering kali merupakan arena perebutan sumber daya yang mengancam

³⁸ Augustine, 14.28.

³⁹ Augustine, 19.21.

⁴⁰ Ayda Eraydin dan Klaus Frey (peny.), *Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice* (1st Edition) (New York: Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781351252881>.

⁴¹ Augustine, *On Free Choice of the Will*, terj. Thomas Williams (Indianapolis: Hackett Publishing, 1993), 1.5.6.

⁴² Augustine, *On Christian Doctrine*, terj. R. P. H. Green (Oxford: Oxford University Press, 1997), 1.3-4.

⁴³ Augustine, *The City of God*, 19.13.

tatanan ini sehingga menjadikan seruan Agustinus untuk keadilan sebagai dasar perdamaian semakin relevan.⁴⁴

Namun, Agustinus juga seorang realis politik. Ia memahami keadilan yang sempurna mustahil di dunia ini. Fungsi negara yang lebih terbatas, tetapi krusial adalah menekan kejahatan dan memelihara perdamaian eksternal. Kekuasaan negara, dalam pandangan ini, adalah “obat” yang diperlukan untuk penyakit dosa sosial.⁴⁵ Seorang pejabat publik, dengan demikian, berfungsi seperti dokter: ia tidak menciptakan kesehatan sempurna, tetapi menahan penyakit (ketidakadilan) dan memelihara kondisi untuk kehidupan yang lebih baik. Realisme ini mencegah idealisme naif, tetapi tetap mempertahankan standar moral: obat tidak boleh menjadi racun. Kekuasaan yang seharusnya menekan kejahatan tidak boleh menjadi sumber kejahatan itu sendiri.

Pandangan Agustinus tentang kebajikan (*virtue*) juga relevan. Ia berpendapat kebajikan klasik, kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan, hanya menjadi kebajikan sejati jika diarahkan oleh cinta kepada Tuhan. Tanpa orientasi ini, kebajikan tersebut bisa menjadi “kejahatan yang gemilang (*splendida vitia*)”.⁴⁶ Seorang pejabat yang tampak bijaksana dalam mengelola proyek, tetapi dimotivasi kesombongan maka kebajikannya palsu. Agustinus memaksa kita untuk tidak hanya melihat penampilan, tetapi mempertanyakan motivasi terdalam (*intentio*) yang mendasari setiap tindakan publik. Pemikirannya ini mengingatkan pada karya saudaranya dalam iman, Gregorius dari Nyssa, yang juga menekankan bahwa citra Allah dalam diri manusia (*imago Dei*) adalah fondasi bagi martabat dan tindakan etisnya.⁴⁷

Terakhir, konsep Agustinus tentang dua kota memberikan perspektif eskatologis. Pejabat yang beriman adalah seorang peziarah (*peregrinus*) di Kota Duniawi; kewarganegaraan sejatinya ada di Kota Allah.⁴⁸ Kesadaran ini menumbuhkan detasemen yang sehat dari kekuasaan. Jabatan publik bukan puncak pencapaian, melainkan tugas sementara yang diemban dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Perspektif ini berfungsi sebagai penangkal ampuh terhadap *libido dominandi*.⁴⁹ Dengan menyadari kefanaan jabatannya dan keabadian pertanggungjawabannya, seorang pejabat didorong untuk bertindak bukan demi warisan duniawi, melainkan demi ganjaran surgawi, sebuah motivasi yang melampaui insentif material apa pun yang ditawarkan oleh sistem sekuler.⁵⁰

Realisme politik Agustinus ini juga memberikan wawasan tentang hubungan antara kota dan pinggiran (*suburbs*) dalam politik perkotaan kontemporer. Agustinus

⁴⁴ Annika Marlen Hinze dan James M. Smith (peny.), *American Urban Politics in a Global Age* (8th Edition) (New York: Routledge, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781315163635>.

⁴⁵ Robert A. Markus, *Saeculum: History and Society in the Theology of St. Augustine* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 106.

⁴⁶ Augustine, *The City of God*, 5.19.

⁴⁷ Gregory of Nyssa, *On the Human Image of God*, peny. dan terj. J. Behr, (Oxford: Oxford University Press, 2023).

⁴⁸ Keungoui Kim, Chiara Ferrante, dan Dieter F. Kogler, “Smart Specialisation Strategies and regional knowledge spaces: how to bridge vision and reality,” *Regional Studies* 58, no. 12 (2024): 2501–17, <https://doi.org/10.1080/00343404.2024.2355985>.

⁴⁹ Dorothee Allain-Dupré dkk., “Regional policy in the new global context,” *Regional Studies* 59, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1080/00343404.2025.2549590>.

⁵⁰ Jonathan J. Armstrong (peny.), *On the Ecclesiastical Mystagogy* (Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 2020).

memahami bahwa “Kota Duniawi” tidaklah monolitik, melainkan terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang sering kali bertentangan. Perjuangan untuk keadilan dan perdamaian harus memperhitungkan dinamika kekuasaan antara pusat-pusat perkotaan dan wilayah sekitarnya. Seorang pejabat publik yang adil, dalam perspektif Agustinian, harus mampu menjadi penengah yang tidak memihak dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan pusat kota yang makmur dengan mengorbankan komunitas pinggiran atau sebaliknya. Keadilan menuntut agar “ketenangan dalam keteraturan” berlaku untuk seluruh lanskap politik, bukan hanya untuk sebagian wilayah saja.⁵¹

Lebih jauh lagi, penekanan Agustinus pada ordo *amoris* (tatanan cinta) memberikan kerangka kerja untuk memahami kegagalan etis dalam administrasi publik. Menurut Agustinus, dosa pada dasarnya adalah mencintai hal-hal dengan cara yang tidak teratur: mencintai hal yang lebih rendah seolah-olah itu yang tertinggi. Korupsi, dalam terang ini, adalah sebuah bentuk “cinta yang tidak teratur”. Pejabat korup adalah orang yang mencintai kekayaan, kekuasaan, atau status lebih dari ia mencintai keadilan dan kebaikan bersama. Oleh karena itu, reformasi sejati tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem (pendekatan institusionalis) atau mengubah norma (pendekatan sosio-kultural), tetapi harus menyentuh “pendidikan hati”, sebuah reorientasi cinta dari pejabat publik. Ini adalah tugas yang melampaui pelatihan teknis dan masuk ke ranah pembentukan karakter yang memberi ruang agar individu belajar untuk menempatkan cinta pada Tuhan dan sesama di atas cinta pada diri sendiri.⁵²

Sintesis Teo-Etis Basilian-Agustinian: Fondasi Moral untuk Reformasi Etos Pejabat Publik di Indonesia

Setelah menganalisis konsep *oikonomia* Basilius dan *iustitia* Agustinus, langkah selanjutnya adalah menyintesis kedua pemikiran tersebut menjadi sebuah kerangka kerja yang koheren dan merumuskan relevansinya sebagai fondasi etis-teologis untuk memulihkan etos pejabat publik di Indonesia. Sintesis ini tidak hanya mengisi kesenjangan teleologis yang diidentifikasi dalam bagian Pendahuluan, tetapi juga menawarkan pelengkap yang bersifat transformatif bagi pendekatan-pendekatan reformasi yang sudah ada (institusionalis, sosio-kultural, dan psikologi perilaku). Kerangka Basilian-Agustinian ini bertumpu pada tiga pilar utama: redefinisi tujuan jabatan, reorientasi motivasi pejabat, dan revitalisasi legitimasi negara.

Pilar Pertama: Redefinisi Tujuan Jabatan dari Kekuasaan (*Power*) menjadi Penatalayanan (*Oikonomia*)

Pilar pertama mengadopsi konsep *oikonomia* Basilius untuk secara radikal mendefinisikan ulang tujuan fundamental dari sebuah jabatan publik. Dalam konteks Indonesia yang sering kali memersepsikan jabatan sebagai simbol status dan jalan menuju kekayaan, sebuah warisan dari budaya feodal dan patronase,⁵³ kerangka Basilian menantang persepsi ini di akarnya. Jabatan publik bukanlah hak milik yang bisa

⁵¹ Levine dan Sanders, *Urban Politics*.

⁵² Augustine, *The City of God*, 15.22. Agustinus membahas bagaimana dosa Kain berasal dari kecemburuan dan cinta yang salah arah, sebuah pola dasar bagi konflik manusia.

⁵³ Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, 112.

dieksploitasi, melainkan sebuah penatalayanan yang dipercayakan. Ini berarti bahwa setiap wewenang, anggaran, dan sumber daya yang melekat pada jabatan tersebut bukanlah milik pribadi pejabat, melainkan amanah dari Tuhan dan rakyat yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama (*bonum commune*).

Secara praktis, aplikasi pilar ini menuntut pergeseran paradigma dalam rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi pejabat publik. Proses seleksi tidak hanya menguji kompetensi teknis, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi individu dengan karakter penatalayan. Pelatihan kepemimpinan di sektor publik harus memasukkan modul etika yang menekankan bahwa kelalaian dalam mendistribusikan pelayanan dan sumber daya kepada yang berhak adalah bentuk korupsi pasif, sebagaimana ditekankan Basilius.⁵⁴ Evaluasi kinerja tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran atau penyelesaian proyek (*output*), tetapi dari dampak nyata pelayanan tersebut terhadap kelompok paling rentan (*outcome*) yang sejalan dengan semangat Basilius.⁵⁵ Dengan demikian, tujuan jabatan direorientasi dari sekadar menjalankan fungsi administratif menjadi sebuah misi aktif untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan berbelas kasih.

Pilar Kedua: Reorientasi Motivasi Pejabat dari Cinta Diri (*Amor Sui*) menjadi Cinta Keadilan (*Amor Iustitiae*)

Pilar kedua menyintesis *oikonomia* Basilius dengan analisis Agustinus tentang motivasi manusia. Jika Basilius menyediakan apa yang harus dilakukan (penatalayanan), Agustinus menjelaskan bahwa seorang pejabat harus melakukannya dengan benar karena didorong oleh tatanan cinta yang benar (*ordo amoris*). Krisis etos pejabat publik pada dasarnya adalah krisis motivasi; sebuah kondisi mengenai cinta pada diri sendiri, kekayaan, dan kekuasaan (*amor sui* dan *libido dominandi*) mengalahkan cinta pada kebaikan bersama dan keadilan.⁵⁶ Kerangka Basilian-Agustinian berargumen bahwa reformasi sejati harus menyentuh “pendidikan hati” pejabat, yakni dengan menggeser motivasi internal mereka.

Aplikasi pilar ini melengkapi pendekatan psikologi perilaku.⁵⁷ Jika pendekatan *behavioral ethics* fokus pada “dorongan” (*nudge*) eksternal untuk mencegah perilaku tidak etis, sintesis patristik ini berfokus pada pembentukan “benteng” internal melalui penanaman *virtue ethics*. Ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan karakter jangka panjang yang menekankan pentingnya integritas, kerendahan hati, dan empati sebagai kebajikan utama seorang pelayan publik. Dengan menginternalisasi perspektif Agustinus bahwa kebajikan tanpa orientasi yang benar hanyalah “kejahatan yang gemilang” (*splendida vitia*),⁵⁸ seorang pejabat didorong untuk terus-menerus merefleksikan niatnya. Motivasi tidak lagi sekadar menghindari hukuman atau mengejar insentif, tetapi menemukan kepuasan intrinsik ketika melayani keadilan sehingga berbuah perasaan “senang berbuat baik”⁵⁹ yang berakar pada panggilan moral yang lebih

⁵⁴ Basil the Great, *Exegetic Homilies*.

⁵⁵ Bianchi, “The democratising capacity of new municipalism.”

⁵⁶ Augustine, *The City of God*, 14.28.

⁵⁷ Tenbrunsel dan Messick, “Ethical Fading,” 225.

⁵⁸ Augustine, *The City of God*, 5.19.

⁵⁹ Meyfrootd, Desmidt, dan Crucke, “Feeling Good About Doing Good,” 880–907.

tinggi.

Pilar Ketiga: Revitalisasi Legitimasi Negara dari Kekuatan Hukum (*Lex*) menjadi Keadilan Moral (*Iustitia*)

Pilar ketiga mengadopsi postulat radikal Agustinus *remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?*⁶⁰ sebagai standar untuk menilai legitimasi negara dan pemerintahannya. Dalam konteks Indonesia, yang sering kali menyandarkan legitimasi pada kemenangan elektoral atau kekuatan hukum formal, kerangka Agustinian mengingatkan bahwa legitimasi sejati bersifat moral. Sebuah pemerintahan, betapapun sahnya secara prosedural, akan kehilangan legitimasi moralnya di mata rakyat jika ia gagal mewujudkan keadilan dan justru menjadi arena perampokan terselubung. Krisis kepercayaan publik yang disorot dalam bagian pendahuluan adalah gejala dari erosi legitimasi moral ini.⁶¹

Aplikasi pilar ini memberikan fondasi filosofis bagi gerakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Upaya-upaya ini tidak boleh dilihat sekadar sebagai program teknis untuk meningkatkan efisiensi atau memperbaiki citra,⁶² melainkan sebagai perjuangan eksistensial untuk mengembalikan hakikat negara sebagai persemakmuran (*res publica*), bukan gerombolan perampok (*magna latrocinia*). Ini memberikan bobot moral yang lebih besar bagi lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman, serta bagi masyarakat sipil yang menuntut akuntabilitas. Dengan standar *iustitia* Agustinian, setiap kebijakan publik dan tindakan pejabat harus diuji dengan pertanyaan fundamental: "Apakah ini memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya?"⁶³ Pertanyaan ini menjadi kompas moral yang menjaga agar negara tidak menyimpang dari tujuan utamanya: mewujudkan "ketenangan dalam keteraturan" (*tranquillitas ordinis*)⁶⁴ bagi seluruh warganya.

Secara keseluruhan, sintesis pemikiran Basilius dan Agustinus menawarkan sebuah kerangka kerja teo-etis yang komprehensif. Ia tidak meniadakan pentingnya reformasi institusional, pemahaman budaya, atau intervensi perilaku, tetapi melengkapinya dengan memberikan fondasi moral dan tujuan teleologis yang selama ini hilang. Dengan mendefinisikan ulang jabatan sebagai penatalayanan, mereorientasi motivasi pejabat pada cinta akan keadilan, dan mengembalikan keadilan sebagai syarat mutlak legitimasi negara, kerangka Basilian-Agustinian ini menawarkan jalan menuju pemulihan etos pejabat publik yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga luhur secara moral.

Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari diagnosis atas krisis etos pejabat publik di Indonesia yang tidak cukup dijelaskan atau diselesaikan oleh pendekatan-pendekatan reformasi dominan yang bersifat institusionalis, sosio-kultural, maupun psikologis-perilaku. Krisis ini, yang berakar pada degradasi jabatan publik menjadi alat pemuas kepentingan pribadi, menandakan adanya kekosongan fondasi moral dan teleologis yang lebih dalam.

⁶⁰ Augustine, *The City of God*, 4.4.

⁶¹ Rothstein, *The Quality of Government*, 35.

⁶² Peters, *The Politics of Bureaucracy*, 189.

⁶³ Augustine, *The City of God*, 19.21.

⁶⁴ Augustine, 19.13.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini berpaling pada kearifan etika politik patristik, khususnya pada konsep *oikonomia* (penatalayanan) dari Basilius Agung dan *iustitia* (keadilan) dari Agustinus dari Hippo. Melalui analisis hermeneutika terhadap karya-karya utama mereka, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk mengonstruksikan sebuah kerangka kerja teo-etis yang relevan bagi konteks kontemporer.

Pertama, analisis terhadap pemikiran Basilius Agung menunjukkan bahwa konsep *oikonomia* secara radikal mereorientasi tujuan jabatan publik dari penguasaan (*power*) menjadi penatalayanan (*stewardship*). Dengan penegasan bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah milik absolut, tetapi amanah yang harus didistribusikan demi kebaikan bersama, khususnya bagi kaum yang paling rentan, Basilius menyediakan sebuah teologi kerja yang transformatif. Etika penatalayanan ini tidak hanya menantang praktik korupsi aktif, tetapi juga korupsi pasif dalam bentuk kelalaian, serta memberikan koreksi kritis terhadap paradigma NPM yang berisiko mereduksi pelayanan publik menjadi sekadar manajemen pragmatis.

Kedua, analisis terhadap pemikiran Agustinus dari Hippo melengkapi kerangka Basilian dengan memberikan kriteria fundamental bagi legitimasi negara itu sendiri. Postulatnya yang terkenal, bahwa negara tanpa keadilan hanyalah gerombolan perampok besar, menetapkan *iustitia* bukan sebagai atribut, melainkan sebagai syarat eksistensial bagi negara. Bagi Agustinus, ketidakadilan berakar pada “cinta yang tidak teratur” (*ordo amoris*) yang mengartikan bahwa cinta pada diri sendiri (*amor sui*) mengalahkan cinta pada Tuhan dan sesama. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa legitimasi sejati sebuah pemerintahan tidak terletak pada kekuatan hukum formal semata, melainkan komitmen moralnya untuk mewujudkan keadilan.

Sintesis dari kedua pemikiran ini menghasilkan sebuah kerangka kerja etis-teologis yang komprehensif dengan tiga pilar utama untuk reformasi etos pejabat publik di Indonesia. Pilar pertama adalah redefinisi tujuan jabatan sebagai penatalayanan yang menuntut perubahan paradigma dari persepsi kekuasaan menjadi misi pelayanan. Pilar kedua adalah reorientasi motivasi internal pejabat dari dorongan cinta diri menuju cinta akan keadilan. Hal itu merupakan sebuah proses pembentukan karakter yang melampaui pelatihan teknis. Pilar ketiga adalah revitalisasi legitimasi negara yang menegaskan kembali bahwa keadilan moral ialah fondasi yang lebih hakiki daripada legalitas prosedural.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan sebuah “fondasi yang hilang” bagi diskursus reformasi birokrasi di Indonesia. Kerangka Basilian-Agustinian tidak menafikan pentingnya perbaikan sistem, pemahaman budaya, atau intervensi perilaku, tetapi melengkapinya dengan memberikan jawaban atas pertanyaan, “Untuk apa kekuasaan itu ada?”. Ia menggeser fokus dari sekadar “pejabat yang bersih” (bebas dari korupsi) menuju “pejabat yang luhur” (berdedikasi pada keadilan). Yang bertindak benar bukan karena takut pada hukuman atau tergiur insentif, melainkan karena didorong oleh komitmen moral dan panggilan transendental yang mendalam. Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan publik menuntut lebih dari sekadar reformasi teknokratis; ia menuntut sebuah pertobatan etis di jantung pelayanan publik, sebuah jalan yang telah ditunjukkan dengan kuat oleh para pemikir patristik lebih dari satu milenium yang lalu.

Referensi

- Allain-Dupré, Dorothée, Delphine Clavreul, Jose-Enrique Garcilazo, dan Ana Isabel Moreno-Monroy. "Regional policy in the new global context." *Regional Studies* 59, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1080/00343404.2025.2549590>.
- Armstrong, Jonathan J., peny. *On the Ecclesiastical Mystagogy*. Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 2020.
- Augustine. *On Christian Doctrine*. Diterjemahkan oleh R. P. H. Green. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- _____. *On Free Choice of the Will*. Diterjemahkan oleh Thomas Williams. Indianapolis: Hackett Publishing, 1993.
- _____. *The City of God*. Diterjemahkan oleh Henry Bettenson. London: Penguin Classics, 2003.
- Basil the Great. *Ascetical Works*. Diterjemahkan oleh Sister M. Monica Wagner. Washington: The Catholic University of America Press, 1962.
- _____. *Exegetic Homilies*, diterjemahkan oleh Sister Agnes Clare Way. Washington: The Catholic University of America Press, 1963. <https://www.scribd.com/document/553602675/Saint-Basil-Exegetic-Homilies-St-Basil-Sister-Agnes-Clare-Way>.
- _____. *On Social Justice: St. Basil the Great*. Diterjemahkan oleh C. Paul Schroeder. Yonkers: St. Vladimir's Seminary Press, 2017.
- Bianchi, Iolanda. "The democratising capacity of new municipalism: beyond direct democracy in public–common partnerships." *Policy & Politics* 53, no. 2 (2025): 403–22. <https://doi.org/10.1332/03055736Y2024D000000033>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th Edition). Thousand Oaks: SAGE Publications, 2017.
- Eraydin, Ayda, dan Klaus Frey, peny. *Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice* (1st Edition). New York: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781351252881>.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method* (2nd Revised Edition). Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. London: Continuum, 1989.
- Gregory of Nyssa. *On the Human Image of God*. Disunting dan diterjemahkan oleh J. Behr. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Heinelt, Hubert, Björn Egner, dan Nikolaos-Komninos Hlepas, peny. *The Politics of Local Innovation: Conditions for the Development of Innovations* (1st Edition). London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003084006>.
- Hertting, Nils, dan Clarissa Kugelberg, peny. *Local Participatory Governance and Representative Democracy: Institutional Dilemmas in European Cities* (1st Edition). New York: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315471174>.
- Hinze, Annika Marlen, dan Dennis R. Judd. *City Politics: Cities and Suburbs in 21st Century America* (11th Edition). London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003175315>.
- Hinze, Annika Marlen, dan James M. Smith, peny. *American Urban Politics in a Global Age*

- (8th Edition). New York: Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781315163635>.
- Kim, Keungoui, Chiara Ferrante, dan Dieter F. Kogler. "Smart Specialisation Strategies and regional knowledge spaces: how to bridge vision and reality." *Regional Studies* 58, no. 12 (2024): 2501-17. <https://doi.org/10.1080/00343404.2024.2355985>.
- Kromer, John. *Fixing Broken Cities: New Investment Policies for a Changed World* (2nd Edition). New York: Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003355854>.
- Levine, Myron A., dan Heywood T. Sanders. *Urban Politics: Cities and Suburbs in a Global Age* (11th Edition). New York: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003291183>.
- Louth, Andrew. *Selected Essays Volume I: Studies in Patristics*, disunting oleh Lewis Ayres dan John Behr. Oxford: Oxford University Press, 2023. <https://www.scribd.com/document/664435893/Andrew-Louth-Selected-Essays-Volume-I-Studies-in-Patristics-ed-Lewis-Ayres-John-Behr>.
- Markus, Robert A. *Saeculum: History and Society in the Theology of St. Augustine*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Meyfrootd, Kenn, Sebastian Desmidt, dan Saskia Crucke. "Feeling Good About Doing Good: How the Perceived Authenticity of Organizational Social Responsibility Impacts Affective Organizational Commitment of Local Government Employees." *Public Performance & Management Review* 48, no. 4 (2025): 880–907. <https://doi.org/10.1080/15309576.2025.2491420>.
- Peters, B. Guy. *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* (7th Edition). New York: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315813653>.
- Pitlik, Hans. "Reforming the Public Administration: The Role of Crisis and the Power of Bureaucracy Reforming the Public Administration." Academia. https://www.academia.edu/79357261/Reforming_the_Public_Administration_The_Role_of_Crisis_and_the_Power_of_Bureaucracy_Reforming_the_Public_Administration_The_Role_of_Crisis_and_the_Power_of_Bureaucracy_Reforming_the_Public_Administration_the_role_of_crisis_and_the_power_of_bureaucracy.
- Rohr, John A. *Public Service, Ethics, and Constitutional Practice*. Lawrence: University Press of Kansas, 1998.
- Rothstein, Bo. *The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective*. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- Tenbrunsel, Ann E., dan David M. Messick. "Ethical Fading: The Role of Self-Deception in Unethical Behavior." *Social Justice Research* 17 (2004): 223–36. <https://doi.org/10.1023/B:SORE.0000027411.35832.53>.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023." <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>.
- Trein, Philipp, dan Thenia Vagionaki. "Why policy failure is a prerequisite for innovation in the public sector." *Policy & Politics* 52, no. 4 (2024): 586–605. <https://doi.org/10.1332/03055736Y2023D000000012>.
- van der Meer, Jasper, Brenda Vermeeren, dan Bram Steijn. "Why do Role Perceptions Matter? A Qualitative Study on Role Conflicts and the Coping Behavior of Dutch Municipal Enforcement Officers." *Urban Affairs Review* 60, no. 2 (2024): 642–67. <https://doi.org/10.1177/10780874231203892>.